

DAFTAR BACAAN

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* Cet. Ke-1. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.
- Asshiddiqi, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2017.
- . *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.
- . *The Constitutional Law of Indonesia - a Comprehensive Overview*. Sweet & Maxwell Asia. Malaysia. 2009.
- Basuki Winarno, Nur. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang Mediatama. Yogyakarta. 2008.
- De Vrieze, Franklin and Victoria Hasson. *Post-Legislative Scrutiny Comparative Study Of Practices Of Post-Legislative Scrutiny In Selected Parliaments And The Rationale For Its Place In Democracy Assistance*. Westminster foundation for democracy (WFD). London. 2017.
- Effendi Lotulung, Paulus. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993.
- Farida Indrati, Maria. *Ilmu Perundang-undangan*, Cet. Ke-7. Kanisius. Yogyakarta. 2007.
- Fatwa, A.M. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Kompas. Jakarta. 2009.
- Hady, Nuruddin. *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi; Paham Konstitusionalisme Demokrasi Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Setara Press. Malang. 2016.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. cet. 15. Raja Grafindo Persada. Depok. 2018.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. cet.V. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010.
- Indrayana, Denny. *Negara Antara Ada Dan Tiada*. Kompas Media Nusantara. Jakarta. 2008.

- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Negara (introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 1994.
- Mahfud MD, Moh. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Gama Media. Yogyakarta. 1999.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Cet 12. Kencana Prenada Media. Jakarta. 2016.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni. Bandung. 1993.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi*. PSH FH UII. Yogyakarta. 2001.
- . *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. LPPM Universitas Padjajaran. Bandung. 1995.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 1992.
- Ronny Rahman Nitibaskara, Tubagus. *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*. Sinar Mulia. Jakarta. 2002.
- Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan. cet. II*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 2015.
- Sri Pudyatmoko, Y. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. Grasindo. Jakarta. 2009.
- Tjandra, Riawan dan Kresno Budi. *Legal Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Atmajaya Press. Yogyakarta. 2009.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010

Jurnal/Makalah

Syofyan Hadi “Mengkaji Sistem Hukum Indonesia (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya”, Volume 12 Nomor 24. Agustus 2016. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015

Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV-2016

Putusan MK No. 79/PUU-XII/2014

Setjend dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Latar Belakang, Proses Dan Hasil Pembahasan 1999-2002. Buku III. Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Jilid III. 2010.

Risalah Rapat Badan Legislasi Pengesahan Jadwal Pembahasan RUU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Rabu, 5 April 2017.

Tatib DPD RI No. 2/DPD/2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan DPD RI No.29/DPD/2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Perma No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil

Peraturan DPD RI Nomor 2 tahun 2019 tentang Tata Tertib

Internet

A.M. Fatwa, Peran DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 30 Maret 2012, diakses melalui kompasiana.com pada 1 Januari 2019.

AA. Oka Mahendra. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, ditjenpp.depkmham.go.id diakses tanggal 26 Mei 2019.

Ahmad Bil Wahid, BNPB: Karhutla 2019 Bakar Lahan 857 Ribu Ha, Terparah dalam 3 Tahun, 22 Okt 2019 diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-4755492/bnpb-karhutla-2019-bakar-lahan-857-ribu-ha-terparah-dalam-3-tahun> pada 17 Desember 2019.

Friski Riana, Pakar Hukum Usul Referendum untuk Amendemen UUD 1945, 30 November 2019, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1278431/pakar-hukum-usul-referendum-untuk-amendemen-uud-1945> pada 10 Desember 2019.

Joko Panji Sasongko, DPR Sahkan RUU MD3 Menjadi Undang-Undang, Senin, 12/02/2018 diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180212181242-32-275684/dpr-sahkan-ruu-md3-menjadi-undang-undang> pada 12 November 2019.

Proses Pengharmonisasian sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan, ditjenpp.kemenkumham.go.id diakses pada 26 Mei 2019.

Ratna Duta Sari Dewi, Politik Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Perda Dan Prolegda, 10 April 2015, diakses melalui <https://jdih.kepriprov.go.id/>, pada 16 Desember 2019.

Saldi Isra, Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, pada Minggu, 09 Mei 2010, diakses melalui <https://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/557-urgensi-naskah-akademik-dalam-penyusunan-peraturan-perundang-undangan.html> pada 10 Desember 2019.

Tanpa Nama, DPD Gandeng Puskapsi Gelar Seminar Kawal Produk Hukum Daerah, 30 November 2015 diakses melalui <http://puskapsi.fh.unej.ac.id/dpd-gandeng-puskapsi-gelar-seminar-kawal-produk-hukum-daerah/> pada 17 Desember 2019.

Umbu Rauta, Pengawasan Perda oleh DPD, Rabu 4 April 2018, diakses melalui <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/76041/pengawasan-perda-oleh-dpd> pada tanggal 04 Desember 2018

Sumber Lainnya

Surat DPD ke pimpinan DPR, No. HM. 310/344/DPD/IV/2017 tanggal 27 April 2017 perihal masukan/ pandangan DPD terhadap RUU tentang MD3.

PULD DPD RI. Mendudukkan Kewenangan DPD Dalam Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Perda Dan Perda. Materi Orientasi Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD).

Materi Orientasi Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD). Mendudukkan Kewenangan DPD dalam Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Perda Dan Perda. PULD DPD RI.2019.

M Hadjion, Philipus. Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. 10 Oktober 1994

Munir, Ernawati. Laporan Pengkajian Hukum tentang Hubungan lembaga Negara pasca Amandemen UUD 1945. Departemen Hukum dan HAM. 2005. Jakarta.